

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita. Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung .
- Bisri, Cik Hasan, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, dan Nurbani, Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ichsan, Achmad, 1969, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Kurniawan, Faizal, *Perkembangan Hukum Perikatan Doktrin Unjustified Enrichment sebagai Dasar Tuntutan ganti Rugi untuk Mewujudkan Keadilan Berperikatan*, Intelgensia Media, Malang .
- Loudoe, John Z., 1981, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Marbun, Rocky, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visimedia, Jakarta.
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi dan Arief. Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sriwaty, Sakkirang, 2011, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supramono, Gatot, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung.
- Suseno, Sigid dan Putri, Nella Sumika, 2013, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2012, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Kencana, Jakarta.
- Wiradipradja, E. Saefullah, 2016, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Cetakan Ke-2*, Keni Media, Bandung.

B. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Harwiyadi, 2017, *Upaya Pengembalian Kerugian Negara melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muib, 2017, *Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Tahap Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Permana, Pinos, 2016, *Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan pada Bank Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia, Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Inpres No. 1 Tahun 2016.

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres No. 3 Tahun 2016 LN. RI. No. 4.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Ketiga.

Indonesia, Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU. No. 30 Tahun 2014 LN. RI. Tahun 2014 No. 292.

Indonesia, Undang-undang tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia, UU. No. 16 Tahun 2004 LN. RI. Tahun 2004 No. 67.

Indonesia, Undang-undang tentang Keuangan Negara, UU. No. 17 Tahun 2003 LN. RI. Tahun 2003 No. 47.

Indonesia, Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU. No. 31 Tahun 1999 LN. RI. Tahun 1999 No.140.

Indonesia, Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 11 Tahun 2004 LN. RI. Tahun 2004 No. 5.

Indonesia, Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU. No. 20 Tahun 2001 TLN. RI. Tahun 2001 No. 4150.

D. Wawancara

Hapsari , Annissa Kusuma, Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung R.I.

